

KORUPSI DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN APARAT PENEGAK HUKUM

¹Engkus¹, ²Azzahra Shabira², ³Cielo Laurensia Marsha³ & ⁴Desvira Shabila Meghantara⁴
UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1),2),3),4)}

Email: engkus@uinsgd.ac.id¹⁾, azzahrashabira26@gmail.com²⁾,
cielo.marsha@gmail.com³⁾, desvirashbl26@gmail.com⁴⁾

Abstrak

Keberadaan wasdal ini perlu diketahui alasan keberadaannya seperti peran dan fungsinya ketika diimplementasikan ke dalam suatu lembaga. Penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam artikel ini, antara lain terkait peran dan fungsi wasdal secara internal dan eksternal, kemudian penerapan sistem tersebut menggunakan contoh lembaga negara yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan bagaimana fungsi lembaga tersebut. keberadaan dan kinerja wasdal dalam pemberantasan korupsi. Dari beberapa rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi wasdal beserta contohnya di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dan untuk mengetahui perannya dalam pencegahan korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengendalian intern dapat dilihat dari pengawasan Inspektorat Jenderal, Inspektorat Kabupaten, dan Badan Pengawas Keuangan Daerah. Sedangkan pengawasan eksternal terlihat dari pengawasan BPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia. Sedangkan aparat penegak hukum adalah lembaga negara. Contoh bentuk pengawasan di Komisi Pemberantasan Korupsi adalah pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Pengawas, DPR, dan masyarakat. Pengawasan dapat mencegah praktik korupsi tergantung pada kekuatan atau kelemahan sistem. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Indonesia memiliki badan pengatur dan penegak hukum internal dan eksternal. Kewenangan pengendalian intern meliputi beberapa contoh, seperti Inspektorat Jenderal, Inspektorat Kabupaten, dan BPKP. Berikutnya, tentang badan pengatur eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia. Lembaga penegak hukum Indonesia, di sisi lain, termasuk polisi Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Militer.

Kata kunci: Korupsi; Pengawasan dan Pengendalian; Aparat Penegak Hukum

Abstract

The existence of this wasdal needs to know the reasons for its existence such as its role and function when it is implemented into an institution. The author formulates several problem formulations in this article, including those related to the role and function of wasdal internally and externally, then the implementation of the system using an example of a state institution, namely the Corruption Eradication Commission, and how the function of the existence and performance of wasdal in eradicating corruption. From some of these formulations, it can be

ARTIKEL

concluded that the purpose of this research is to determine the role and function of wasdal along with examples in the Corruption Eradication Commission institution and to know its role in preventing corruption. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. The results showed that the internal control function can be seen from the supervision of the Inspectorate General, Regency Inspectorate, and Regional Financial Supervisory Agency. Meanwhile, external supervision is seen from the supervision by the Financial Audit Board, the Corruption Eradication Commission, and the Ombudsman of the Republic of Indonesia. Meanwhile, law enforcement officers are state institutions. An example of a form of supervision at the Corruption Eradication Commission is supervision by the Financial Audit Agency, the Supervisory Board, the House of Representatives, and the public. Supervision can prevent corrupt practices depending on the strength or weakness of the system. The conclusion that can be drawn is that Indonesia has internal and external regulatory agencies and law enforcement agencies. The internal control authority includes several examples, such as the Inspectorate General, Regency Inspectorate, and BPKP. Next, about external regulatory bodies such as the Financial Audit Agency, the Corruption Eradication Commission, and the Ombudsman of the Republic of Indonesia. Indonesian law enforcement agencies, on the other hand, include the Indonesian police, the Constitutional Court, the Supreme Court, and the Military Court.

Keywords: *Corruption; Supervision and Control; Law Enforcement Officials;*

A. PENDAHULUAN

Pengawasan dan pengendalian atau dikenal dengan istilah Wasdal yakni suatu fungsi manajemen yang berperan dalam perolehan capaian tujuan organisasi sebab orientasinya gerhadap proses dan hasil dengan sifat korektif, dimana proses dan output yang sudah didapat selaras dengan perencanaan yang telah ditentukan atau belum. Fungsi manajemen dengan kontrol yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengendalian. Berbagai kasus kerap terjadi pada organisasi sebagai dampak dari lemahnya kontrol atau pengendalian yang menyebabkan berbagai penyelewengan antara rencana dengan apa yang dilakukan.

Eksistensi wasdal ini perlu diketahui alas an keberadaan seperti peran dan fungsinya ketika diimplementasikan ke dalam suatu lembaga. Peranan pengawasan membuat yakim bahwasanya segalanya mampu terlaksana sesuai komitmen yang ditentukan. Pengawasan memberi umpan balik terkait perencanaan bagi periode selanjutnya apakah mampu dilaksanakan sesuai output pengawasan dari kegiatan sebelumnya atau tidak. Snyder (1990) menyatakan: *you must first be on the path, before you can turn and walk into the wild*. Pengawasan dan pengendalian dalam segi peran dan fungsinya dibagi dua yaitu eksternal dan internal, dimana kedua jenis itu sangat diperlukan dalam cara kerjanya. Selain itu, eksistensi APH (aparatus penegak hukum) sebagai *controller* pun berperan penting.

Peran dan fungsi wasdal tidak hanya sebatas pada keberadaan dan kebermanfaatan kerjanya dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintah, namun atas dasar menciptakan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, melalui wasdal ini maka mampu dibangun

transparansi untuk mencegah praktik korupsi melalui fungsi-fungsi yang dijalankan baik oleh eksternal maupun internal.

Tindak lanjut korupsi tidak sebatas membentuk lembaga pengawasan luar atau eksternal, namun implementasi pengawasan/supervisi internal pun sama urgensinya, karena pengawasan internal ibaratnya ujung tombak untuk pelaksanaan pengawasan yang bersifat preventif juga represif kepada praktik korupsi. Maka dari itu, usaha dalam mendapatkan tujuan dibutuhkan sistem kelembagaan pengawasan pengendalian atau supervisi ternal dan eksternal yang melembaga, dalam artikel ini menggunakan contoh implementasi dari system wasdal di lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Otoritas besar yang dimiliki lembaga negara independen, susah lazim berketerlibatan terhadap eksistensi mekanisme kelembagaan yang menjalankan pengawasan kepada otoritas atau kekuasaan besar. Namun, di lembaga independen kerap sulit memformasi pengawasan atas pengawasan. Maka dari itu, lembaga negara yang sifatnya independen, seperti halnya KPK membutuhkan pengawasan supaya mampu menangkal praktik penyelewengan.

Melalui eksistensi system pengawasan pengendalian dan hasilnya dalam bentuk aporan, diharapkan terdapat pemerintahan baik yang secara konsisten mengusahakan berbagai cara hingga diterbitkannya UU No. 28 Tahun 1998 terkait Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Hal ini juga menjadi daya yang perlu diselenggarakan supaya apa yang dilaksanakan pemerintahan memperoleh dukungan dan pengakuan masyarakat lewat pengawasan dan pengendalian atau wasdal sebagai realisasi pencegahan atas bentuk kecurangan pada penyelenggaraan pemerintahan. (Maharani & Rosilawati, 2018)

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan dalam artikel ini diantaranya terkait bagaimana peran dan fungsi wasdal secara internal eksternal, lalu wujud implementasi sistemnya menggunakan suatu contoh lembaga negara yakni KPK, dan bagaimana fungsi dari eksistensi dan kinerja wasdal dalam pemberantasan korupsi. Dari beberapa rumusan tersebut, dapat diperoleh tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi wasdal beserta contohnya di lembaga KPK serta mengetahui peranannya dalam mencegah korupsi.

B. KAJIAN TEORI

Dalam mendukung permasalahan terkait bahasan, penulis berusaha mencari literatur mendukung permasalahan serta penelitian terdahulu atau prior research yang relevan terhadap bahasan. Penelitian tersebut yakni berasal dari jurnal dengan judul "Pengawasan untuk Pemberantasan Korupsi" oleh Haryono Umar tahun 2018. Penelitian ini menelaah tentang tindak pidana korupsi di Indonesia dan fungsi pengawasan didalamnya. Hasil penelitian ini memperoleh bahwa peranan pengawas akan tidak optimal jika tidak disertai peranan profesi lain seperti sosiolog, pendidik, politisi, masyarakat. Pengawasan dengan profesionalisme berupa integritas juga penting. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian kami yakni sama sama mengkaji tentang eksistensi pengawasan dalam menghadapi tindak pidana korupsi serta metode studi literatur yang digunakan. Sementara itu, perbedaannya yakni penelitian terdahulu tersebut hanya berfokus pada eksistensi pengawasan dalam korupsi, sementara penelitian ini juga mengkaji secara lebih dalam peranan dan fungsi pengawasan pengendalian dan aparat penegak hukum. Dalam

ARTIKEL

mendukung permasalahan terkait bahasan, penulis berusaha mencari literatur mendukung permasalahan serta penelitian terdahulu atau prior research yang relevan terhadap bahasan.

1. Definisi Peran dan Fungsi

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), yaitu peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), jika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai, maka ia berperan. masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dalam menjalankan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah dipercayakan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Invincevich dan Donelly (2002), peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, umumnya organisasi. (Badan et al., 2017)

Dengan demikian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsepsi peran yang dimainkan oleh suatu partai dalam oposisi sosial, yang diberikan secara struktural (norma, harapan, tabu, tanggung jawab) serangkaian tekanan dan kenyamanan yang mengikat penyalia bersama-sama dan mendukung fungsinya dalam organisasi Peran adalah seperangkat perilaku dengan kelompok, besar dan kecil, semua memainkan peran yang berbeda.

Pada hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai rangkaian perilaku tertentu yang disebabkan oleh kedudukan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu dimainkan. Peran yang dimainkan oleh pemimpin tingkat tinggi, menengah dan rendah akan memainkan peran yang sama.

Menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu mengatakan bahwa fungsi adalah rincian tugas-tugas yang dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing didasarkan pada sekelompok kegiatan yang serupa tergantung pada sifat atau pelaksanaannya. Sementara itu, pengertian singkat tentang pengertian fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008 : 22), fungsi ini merupakan aspek tertentu dari tugas tertentu.¹ (Janice, 2015)

2. Definisi WASDAL

Pengawasan dan pengendalian (wasdal) adalah suatu fungsi manajemen yang memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi, karena fungsi wasdal yang berorientasi pada proses dan hasil (goal achievement) bersifat korektif apabila proses dan hasil yang diperoleh sesuai dengan pra-rencana yang telah ditetapkan.

Menurut George R. Tery (2006:395) pengawasan sebagai penetapan atas apa yang telah dilaksanakan, yaitu penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan dan bila perlu pelaksanaan pelaksanaan tindakan korektif agar hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengawasan terhadap pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

ARTIKEL

Salah satu pengertian pengawasan adalah menentukan apa yang telah dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan pekerjaan dan bila perlu mengambil tindakan korektif untuk menjamin agar hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Pengendalian atau pengawasan dapat dianggap sebagai kegiatan untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang diperoleh dalam kegiatan yang direncanakan. (Priyambodo, 2017)

3. Definisi APH

Penegakan hukum merupakan sistem di mana anggota pemerintah bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, mencegah, mengambil atau menghukum mereka yang melanggar hukum dan peraturan hukum yang mengatur masyarakat tempat tinggal anggota penegak hukum.

Meskipun istilah ini secara umum mencakup polisi, pengadilan dan penjara masyarakat, istilah ini juga secara umum digunakan untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan bagian dari kepolisian resmi) yang terlibat langsung dalam patroli dan pengawasan, untuk mencegah atau melumpuhkan dan mendeteksi aktivitas kriminal dan bagi mereka yang menyelidiki kejahatan dan menangkap penjahat. (Wikipedia, n.d.-b)

4. Korupsi

Korupsi atau fraud atau mencuri (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling) yakni tindakan yang dilakukan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, dan pihak lain yang ikut serta dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang diotoritaskan terhadap mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. (Wikipedia, 2021)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan investigasi sistematis terhadap isu-isu yang berkaitan dengan tingkat korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan/literatur, penelitian documenter, dan diskusi terfokus, serta metode analisis data yang dipilih adalah reduksi data, penyajian data, dan penyajian kesimpulan/validasi. Data sekunder akan digunakan sebagai sumber data untuk penelitian ini. Artinya, format data yang berupa arsip dan dokumen, serta hasil penelitian sebelumnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL)

(Engkus, Hoerudin, & Maolani, 2019) Silalahi (2013: 175) menyatakan: "Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan". Hal ini pun mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan dari apa yang telah terjadi direncanakan. Maka dari itu, pengawasan harus memastikan bahwa penyelenggaraan

rencana berjalan sebagaimana yang ditetapkan sebelumnya. Maka dari itu, dalam mendapat tujuan selaras dengan penetapan rencana maka aktivitas pengawasan. Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian, dibutuhkan peranan dan fungsi aparat dan lembaga baik internal dan eksternal, karena pengawasan akan maksimal jika dilaksanakan dari dalam lembaga dan dari luar lembaga.

- **Internal**

Technically operational, supervision and control (internal) based on 3 (three) dimensions: monitoring, evaluation and reporting. Pengendalian internal dilakukan berdasarkan dimensi pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh aparatur dalam organisasi itu sendiri (Engkus,2018). Dalam menjaga supaya pelaksanaan pemerintahan terlaksana selaras dengan sasaran dan tujuan yang diinginkan, butuh adanya pengawasan dari berbagai pihak berwenang terhadap lembaga itu sendiri. (Siwy, Saerang, & Karamoy, 2016) Menurut Mulyadi (2001: 163), menyatakan bahwa pengawasan internal termasuk struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan memotivasi dipatuhinya kebijakan manajemen. (Engkus et al., 2019) Dalam lingkup daerah secara umum pengawasan internal pemerintah daerah meliputi: (a) pelaksanaan pemerintah lokal; dan (b) kinerja aparatur pemerintah daerah. Adanya pengawasan internal oleh aparat dalam organisasi pemerintahan itu sendiri sangat berperan penting dalam rangka mengembangkan operasional organisasi atau lembaga tersebut lembaga, atau perusahaan. Lembaga pengawasan internal BPKP, Itjen, dan Bawasda mengidentifikasi kebutuhan pimpinan lembaga dalam menjalankan pengawasan pengendalian dan penyusunan kebijakan atas masukan dari output pelaksanaan pengawasan tersebut. Ketiga institusi tersebut hakikatnya memiliki fungsi sama yakni melakukan audit internal kinerja keuangan pemerintahan, maka diintegrasikan dalam rangka pencegahan praktik korupsi dan pengawasan serta investigasi dini supaya lebih terorganisir dan fokus. Dalam rangka mencapai predikat good governance, transparansi, dan akuntabel dalam internal pemerintahan tidak hanya pada penggabungan auditor internal saja tetapi juga lembaga tersebut perlu merangkul societ melalui adding public value terhadap masyarakat.

Pada struktur organisasi pemerintahan di Indonesia, fungsi pengawasan internal secara luas dilaksanakan oleh Inspektorat Jendral (Itjen), Inspektorat Kabupaten, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Inspektorat Jenderal (Itjen)

Inspektorat Jendral merupakan satuan unit yang berperan sebagai supporting element dalam menyelenggarakan fungsi controlling dalam sistem manajemen guna memastikan roda organisasi berjalan dengan efektif dan efisien hingga berbagai pedoman dan ketentuan oerundang-undangan yang berlaku pada seluruh satuab kerja dalam melaksanakan tugasnya mampu ditaati. Secara fungsional, inspektorat jenderal melakukan pengawasan internal kepada seluruh kegiatan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kementerian negara atau lembaga yang dana nya berasal dari APBN. Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan fungsinya dibagi kedalam 5 klasifikasi inspektorat, dimana empat inspektorat regular yang bertugas meng-audit kinerja dan satu inspektorat khusus yang bertugas menjalankan investigasi. Perbedaan dari kedua audit tersebut yakni inspektorat regular mendapat kegiatan rutin dan regular setiap hati, sementara inspektorat

ARTIKEL

investigasi menjalankan tugas-tugas khusus misalnya laporan masyarakat dan tujuan tertentu serta mengawasi langsung dari perintah inspektur jenderal atau menteri. (Alfaruqi & Purwatiningsih, 2013)

(Wikipedia, n.d.-a) Tugas Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan fungsi, diantaranya menyusun kebijakan teknis pengawasan internal, melaksanakan pengawasan internal terkait kinerja dan keuangan lewat audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan lain, melaksanakan pengawasan terkait tujuan tertentu atas penugasan inspektur jenderal/ Menteri, menyelenggarakan laporan hasil pengawasan atau laporan Wasdal, dan melaksanakan administrasi Inspektorat Jenderal.

Inspektorat Kabupaten/Kota

Inspektorat Kabupaten/Daerah merupakan satuan kerja yang berperan sebagai pengawas intern pemerintah daerah dengan tanggung jawab langsung terhadap kepala daerah. Inspektorat Kabupaten adalah lembaga pengawasan fungsional yang mempunyai makna penting secara signifikan dalam pengawasan di pemerintahan daerah. Peranan Inspektorat Kabupaten sebagai satuan kerja yang menjamin agar pemerintahan daerah mampu terlaksana sesuai rencana berdasar ketentuan perundangan yang berlaku. Sementara itu, fungsi atau tugas Inspektorat Kabupaten yakni melaksanakan pengawasan terkait program pemerintahan daerah, memformulasikan kebijakan pengawasan pemerintah daerah, memeriksa pengaduan terkait penyimpangan pelaksanaan program pemerintah di daerah. (Rachmawan, Alamsyah, Laksana, & Probohudono, 2020)

Badan Pengawasan Keuangan Daerah (BPKD)

Badan Pengawasan Keuangan Daerah adalah lembaga pemerintah yang bukan kategori kementerian serta berada langsung dibawah naungan presiden dan berperan sebagai penyusun rencana nasional makro, perumus kebijakan dalam mendukung pembangunan, menetapkan sistem informasi pendukung, memasuki semua kantor, bengkel, gudang, gedung dan lain sebagainya. Selain itu, BPKP juga berperan mengawasi kasus, surat berharga, gudang, meneliti catatan elektronik, dokumen, buku keuangan, surat bukti, meminta informasi tindak lanjut terkait pengawasan baik hasil dari BPKP maupun BPK dan lembaga pengawas lain. Sementara itu, BPKP berfungsi untuk mengatur dan mengkaji kebijakan dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan negara, memformulasikan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional, memadukan kegiatan fungsional untuk penyelenggaraan tugas BPKP, serta melaksanakan jasa dan edukasi bidang perencanaan umum, administrasi, kepegawaian, organisasi, penyimpanan, keuangan, persandian, hukum, dan lain sebagainya. (Rachmawan et al., 2020)

- **Eksternal**

Pengawasan eksternal yakni bentuk pengawasan atau supervisi yang dijalankan oleh petugas dari luar organisasi itu sendiri dengan contoh pengawasan di bidang keuangan yang menjadi wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (Engkus et al., 2019). Pengawasan dan pengendalian eksternal berperan sebagai subjek pengawas pihak luar dari organisasi objek yang berfungsi Secara umum ada empat bentuk pengawasan eksternal, salah satunya masyarakat dan

ARTIKEL

tiga diantaranya lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Obligasi Negara Ritel (ORI).

(Kaldera, Aulia, & Faza, 2020) BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan menjadi lembaga yang memiliki peran dalam mendorong kesadaran para penyelenggara negara supaya mempunyai integritas untuk mengelola keuangan negara. Sebagai lembaga pengawas eksternal, pemeriksaan dilaksanakan oleh lembaga yang berkedudukan di luar lembaga/badan sebagai sasaran yang diperiksa. Selain itu, BPK pengawasannya bersifat represif yakni pengawasan dijalankan setelah pekerjaan atau tugas dilakukan. Mekanisme pengawasan yang dijalankan BPK sebagaimana pada penjelasan umum UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Negara bahwa: *“Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”*

Lembaga selanjutnya adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yakni lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang sifatnya independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK mengambil dua peranan sekaligus yakni tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang dinilai kurang berupaya dalam melawan korupsi. Di sisi lain, KPK berfungsi melaksanakan supervisi kepada instansi dimana berwenang melakukan tindak pidana korupsi juga dalam melakukan penelitian pengawasan, dan penelaahan kepada instansi yang menjalani wewenang dan tugas berkenaan pemberantasan korupsi dan instansi yang melakukan pelayanan publik.

ORI atau Ombudsman Republik Indonesia yakni lembaga kemandirian yang tidak mempunyai tautan organik dengan negara dan lembaga pemerintahan lainnya serta ketika melaksanakan tugas bebas dari intervensi lembaga lain. Di negara Indonesia sesuai yang tercantum pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ORI memiliki peran dan fungsi melakukan control kepada kekuasaan/kewenangan lembaga penyelenggara pelayanan public melalui Langkah-langkah dalam menindaklanjuti informasi atau laporan terkait penyelewengan yang terjadi akibat penyelenggara negara dalam hal menjalankan tugasnya maupun melakukan pelayanan umum.

Sementara itu, control dari masyarakat sebagai pihak eksternal sesuai Permendagri No.25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah terkenal dengan istilah wasmas atau pengawasan masyarakat yang dibutuhkan dalam merealisasikan peran sertra masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah efektif, efisien, bersih, serta bebas praktik KKN yang dilaksanakan melalui pengadaan atas dugaan adanya penyalahgunaan wewenang pemerintahan atau penyimpangan. (“JENIS-JENIS PENGAWASAN,” 2016)

Aparat Penegak Hukum (APH)

Istilah penegakan hukum biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga penegak hukum setempat, tetapi biasanya mengacu pada individu yang terlibat langsung dalam patrol dan pengawasan untuk mencegah (termasuk mereka yang bukan polisi resmi). Kegiatan dan individu yang menyelidiki kejahatan dan menangkap penjahat secara pribadi atau dalam bentuk polisi atau lembaga penegak hukum lainnya untuk mendeteksi penjahat. Di bawah ini adalah contoh aparat penegak hukum Indonesia:

Kepolisian Negara RI

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian negara Indonesia, yang melapor langsung kepada Presiden. Polri memiliki semboyan Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri menyelenggarakan fungsi kepolisian di seluruh Indonesia yaitu memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat; penegakan hukum; dan memberikan perlindungan, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polri memiliki call center yang dapat dihubungi oleh masyarakat yang memerlukan bantuan kepolisian, yaitu:

Peran polisi ditentukan oleh pemerintah. Artinya, keberadaannya telah dijamin oleh pemerintah. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Sebagai aturan umum, Polri juga mendukung keberlanjutan lembaga pemerintah lainnya. Misalnya mendampingi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan direktorat jendral lainnya yang membutuhkan bantuan hukum. Kehadiran polisi merata dari tingkat pusat hingga daerah.

Di daerah ada satuan polisi yang disebut Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Unit ini pada umumnya menegaskan aturan dan ketertiban warga supaya kehidupan masyarakat setempat tetap aman dan damai. Yang biasa disinggung media adalah tindakan Satpol PP yang kerap menertibkan pedagang kaki lima illegal merusak tata kota dan kenyamanan warga.

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) menangani masalah-masalah aturan di meja pengadilan. Lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Alasannya sederhana, pengadilan pada akhirnya akan memutuskan apakah akan melanjutkan suatu kasus, terutama dalam sengketa yang tidak ada yurisprudensinya. Keberadaan MK baru dikukuhkan pada tahun 2003 dengan disahkannya butir-butir MK. UU No. 2 Tahun 2003, yang disahkan pada Agustus tahun yang sama, mengatur tentang Mahkamah Konstitusi.

a) Hakim Konstitusi

Hakim adalah orang yang berwenang mengadili suatu perkara. Hakim Mahkamah Konstitusi dapat tetap menjabat selama dua periode, yang masing-masing berlangsung selama lima tahun. Ada 9 hakim konstitusi, masing-masing terdiri dari:

- 3 orang pilihan dari MA
- 3 orang pilhan dari DPR
- 3 orang pilihan dari Presiden

b) Ketua Mahkamah Konstitusi

Ketua MK adalah orang yang menjadi pimpinan lembaga MK. Ketua MK dipilih oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan tiga tahun.

Mahkamah Agung

MA memiliki peringkat tinggi dalam sistem peradilan Indonesia. MA menentukan masalah di tingkat Pengadilan Kasasi. Tugas dan fungsi MA juga beragam. Saat ini terdapat beberapa kasus peradilan, yaitu:

- Kasus pertama: Pengadilan Negeri
- Kasus kedua: Pengadilan Tinggi
- Tingkat kasasi: Mahkamah Agung

Yurisdiksi Mahkamah Agung mencakup berbagai bidang peradilan. Dari lingkup peradilan umum hingga militer. Karena kekuasaan Mahkamah Kasasi, maka Mahkamah Agung juga mempunyai kekuasaan untuk mempertimbangkan Presiden dalam menjatuhkan anugrah dan rehabilitasi. Mahkamah Agung terdiri dari:

- Calon Hakim Agung: Calon Hakim Agung diajukan ke FREP oleh Komisi Yudisial (KY). Namun, pengesahan dilakukan oleh Presiden.
- Hakim Mahkamah Agung: Mencakup hingga 60 anggota yang dapat dipilih berdasarkan latar belakang hukum atau keahlian akademis mereka.
- Ketua Mahkamah Agung: Ketua Mahkamah Agung hanya seorang anggota Mahkamah Agung. Selain itu, jabatan ketua dapat diusulkan oleh presiden langsung dari seorang ahli.

Pengadilan Militer

Terdapat berbagai tingkatan pengadilan militer. Faktanya, pengadilan militer adalah perwakilan dari peradilan di dalam angkatan bersenjata. Pendidikan dianggap atas dasar keamanan nasional. Wilayah di sekitar PN juga dikategorikan berdasarkan tingkatan sebagai berikut (Nurlaili, 2016):

- Pengadilan Militer tingkat A berada di kota tempat KODAM berada
 - Pengadilan Militer tingkat B adalah tempat KOREM memiliki pengadilan militer.
- Sebenarnya, ada banyak jenis pengadilan lainnya, tergantung pada kisaran tertentu.

Tolak ukurnya adalah posisi yudisial yang disebutkan diatas. Misalnya, inkuisisi dunia kegamaan ada di kota atau distrik dan inkuisisi ada di provinsi.

Contoh Bentuk Supervisi: Studi Kasus Lembaga Kpk

KPK adalah lembaga yang memiliki peran penting dan besar dalam memberantas praktik korupsi, lalu bagaimana bentuk pengawasan pengendalian terhadap KPK itu sendiri? Penulis menggunakan contoh realisasi bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap KPK. Bentuk supervisi terhadap KPK dilaksanakan melalui pengawasan yang dilaksanakan masyarakat atau civil society lalu oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) serta lembaga lain yang berwenang rutin dan konsisten mengawal serta mengawasi kinerja KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Secara eksternal, DPR memiliki fungsi legislatif, fungsi pengawasan, dan fungsi budget. Dari ketiga fungsi tersebut ada fungsi pengawasan terhadap KPK, bentuk pengawasan tersebut terhadap suatu kebijakan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. DPR tidak hanya memanggil pimpinan KPK namun juga staff serta penyidik KPK juga. Jika ada dugaan pelanggaran etik atau tindak pidana maka DPR bisa melanjutkannya ke lembaga peradilan. Dalam contoh kasus, misalnya Komite Etik KPK dinilai tak memiliki standar baku seperti dalam rekrutmen anggota komite DPR bisa melaksanakan revisi UU melalui masukkan klausul tegas atas komite etik KPK.

ARTIKEL

Selanjutnya pengawasan oleh BPK, dimana ranah kekuasaannya berdekatan dengan fungsi pengawasan DPR. Maka dari itu, laporan hasil pemeriksaan BPK perlu dilaporkan kepada DPR agar diurus sebagaimana mestinya. BPK melakukan supervisi melalui cara melaksanakan pengawasan terkait pengelolaan keuangan negara terdiri dari pengaudit kepada penggunaan uang negara serta pengaudit kepada kinerja KPK itu sendiri di bidang pencegahan dan penindakan.

Sementara itu, di KPK juga terdapat Dewan Pengawas yang melakukan pengawasan berada dalam kendali presiden selalu pemimpin negara. Dewan pengawas bertugas dalam memberi izin atau tidak terkait penggeledahan, penyadapan, melaksanakan sidang dalam pemeriksaan dugaan penyimpangan kode etik oleh pegawai maupun pimpinan KPK, menerima serta menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat atas dugaan penyimpangan kode etik pegawai dan pimpinan KPK, serta mengevaluasi kinerja pegawai dan pimpinan KPK secara rutin selama satu kali setahun. (Setyawan, 2019)

Eksistensi Pengawasan Terhadap Korupsi

Adanya wasdal dalam lembaga pemerintahan, termasuk di bidang kepegawaian yang dilaksanakan aparat wasdal seperti inspektur merupakan unsur penting dalam rangka merealisasikan pemerintahan yang baik dan bersih serta efisien. Wasdal secara internal dan eksternal ditujukan dalam rangka menciptakan *good governance* yang berfokus juga pada pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam aspek internal, auditor internal negara bertugas menanggulangi dan memberantas korupsi di pemerintahan dengan capaian utama mampu membantu manajemen melaksanakan pengendalian intern secara optimal untuk mencegah korupsi. Tidak hanya itu, auditor internal wajib paham dengan tepat cara mendeteksi berbagai kecurangan yang muncul sejak dini. Setelah memahami jenis bentuk kecurangan, auditor internal perlu paham struktur pengendalian internal yang baik supaya mampu melaksanakan usaha pendeteksian kecurangan. COSO atau *Committe of Sponsoring Organizations* mengungkapkan struktur pengendalian internal berupa informasi dan komunikasi, penaksiran risiko, lingkungan pengendalian, standar pengendalian, dan pemantauan. Sementara itu, pendekatan untuk mengurangi korupsi dilakukan dengan melaksanakan audit atas manajemen pengendalian fraud pada instansi, mengaudit atas proses dengan risiko fraud tinggi, mempertimbangkan aspek fraud dalam kegiatan audit, serta membantu manajemen mengevaluasi risiko fraud kemudian memastikan apakah kontrol fraud sudah memadai (Rachmawan et al., 2020). Dalam lingkup eksternal, kita bisa melihat salah satu contohnya BPK dimana bentuk fungsi pengawasannya sebagai lembaga mandiri dan independen, BPK bergerak sebagai salah satu daya untuk meminimalisir praktik KKN dan mengupas bagaimana bentuk kejahatan terkait keuangan negara. Selain itu, eksistensi berupa ketegasan dan konsistensi aparat penegak hukum juga penting dalam mecegah sekaligus memberantas korupsi.

Namun, apabila kontrol/wasdal lemah, maka potensi korupsi akan tinggi. (Trisakti, Afiyah, & Suparman, 2020) Lemahnya pengendalian manajemen, dimana pengendalian manajemen ini sebagai salah satu syarat mengatasi korupsi pada organisasi. Ketika kontrol manajemen organisasi menjadi kemah, maka akan berpotensi tindak korupsi dari aparat pengawas. Secara umum, pengawasan terbagi menjadi pengawasan internal (operasional) dan eksternal (oleh masyarakat umum dan legislator).

ARTIKEL

Maka dari itu, wasdal memiliki peran dan fungsi untuk meminimalisir potensi korupsi, namun pada dasarnya tergantung pada seberapa kuat atau lemahnya kontrol tersebut. Kontribusi pihak lain seperti politisi, pendidik, sosiolog, masyarakat juga mampu memaksimalkan peranan pengawasan disertai juga integritas dan profesionalisme disamping kompetensi auditor.

E. SIMPULAN

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang, yang merupakan seperangkat hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam menjalankan suatu fungsi. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Indonesia memiliki badan pengatur internal dan eksternal dan lembaga penegak hukum. Kewenangan pengendalian internal mencakup beberapa contoh, seperti Inspektorat Jendral, Inspektorat Kabupaten, dan BPKP. Berikutnya, tentang badan pengatur eksternal seperti BPK, KPK, dan Ombudsman RI. Lembaga penegak hukum Indonesia, di sisi lain, termasuk polisi Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Militer.

REFERENSI

- Alfaruqi, M. U., & Purwatiningsih. (2013). *ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DAN PERAN INSPEKTORAT JENDERAL DALAM PENERAPAN GOOD PUBLIC GOVERNANCE (STUDI KASUS: KEMENTERIAN PERTANIAN)*. Retrieved from http://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2019/02/SAP2_Kajian-Akuntansi-Hewan-Ternak.pdf
- Badan, P., Pembangunan, P., Dalam, D., Tomohon, R. K., Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Engkus, Hoerudin, C. W., & Maolani, D. Y. (2019). Supervision and Control of The Government Internal Supervisory Apparatus in The Implementation of Regional Autonomy. *International Journal of Science and Society*, 1(1), 56–69.
- Engkus et al (2020). Bureaucratic Corruptive Behavior: Causes And Motivation qaaof State Civil Aparatures in Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 5290–5303. <https://doi.org/10.37200/ijpr/v24i4/pr201627>.
- Janice, A. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa BPMD dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1460–1471. Retrieved from [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL_ELLA_\(10-13-15-11-03-27\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL_ELLA_(10-13-15-11-03-27).pdf)

ARTIKEL

- JENIS-JENIS PENGAWASAN. (2016). Retrieved from Website Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng website: <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>
- Kaldera, N. X., Aulia, M., & Faza, H. A. (2020). Peran BPK Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 13–26. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.898>
- Maharani, D., & Rosilawati. (2018). *Maka Penyelenggaraan Pemerintahan Di Masing- Masing Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah*. 1(44), 51–58.
- Priyambodo, B. H. (2017). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Pengendalian di Operasional Polsek Bengkalis. Retrieved from RiauGreen.com website: https://riaugreen.com/view/Ruang-Opini/26427/Pelaksanaan-Fungsi-Pengawasan-dan-Pengendalian-di-Operasional-Polsek-Bengkalis.html#.YX_SwW1BzIV
- Rachmawan, F., Alamsyah, Z., Laksana, R. H. C., & Probohudono, A. N. (2020). *Usulan Penggabungan BPKP, Itjen, dan Bawasda untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Rangka Mengurangi Praktik Korupsi di Indonesia*. 1–21. Retrieved from http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA_XVIII/makalah/110.pdf
- Setyawan, F. A. (2019). Rincian Tugas Dan Wewenang Dewan Pengawas KPK. Retrieved from CNN INDONESIA website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191220173845-20-458773/rincian-tugas-dan-wewenang-dewan-pengawas-kpk>
- Siwy, M. I., Saerang, D. P. E., & Karamoy, H. (2016). PELAKSANAAN FUNGSI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) UNTUK MENUNJANG TINGKAT KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MANADO. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Umar, H. (2012). Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. *Akutansi Dan Auditing*, 8(2), 109–122.
- Wikipedia. (n.d.-a). Inspektorat Jenderal. Retrieved from Wikipedia website: [https://id.wikipedia.org/wiki/Inspektorat_Jenderal#:~:text=Inspektorat Jenderal \(disingkat Itjen\) adalah,dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal](https://id.wikipedia.org/wiki/Inspektorat_Jenderal#:~:text=Inspektorat%20Jenderal%20(disingkat%20Itjen),adalah,dipimpin%20oleh%20seorang%20inspektur%20jenderal.).
- Wikipedia. (n.d.-b). Penegakan Hukum. Retrieved from Wikipedia website: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum
- Wikipedia. (2021). Korupsi. Retrieved from Wikipedia website: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Korupsi>